

**ANALISIS HUBUNGAN BELANJA MODAL TERHADAP BELANJA
PEMELIHARAAN PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Skripsi

Program Studi Akuntansi



School Of Business

Diajukan oleh:

**MUH. FATHUR RAHMAN, R
2018222432**

**KONSENTRASI AKUNTANSI KORPORASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

**ANALISIS HUBUNGAN BELANJA MODAL TERHADAP
BELANJA PEMELIHARAAN PADA ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**

diajukan oleh :

Nama : MUH. FATHUR RAHMAN. R

NIM : 2018222432

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir/Skripsi
STIE Nobel Indonesia pada tanggal 18 September 2020
dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Akademik
Sarjana Akuntansi + S.Ak




Makassar, 23 September 2020

Tim Penguji

Ketua : Drs. H. Abdul Rauf, MM


Sekretaris : Dr. Indra Abadi, SE, M.Si

Anggota : Fina Diana, SE, Ak, M.Si *Business*

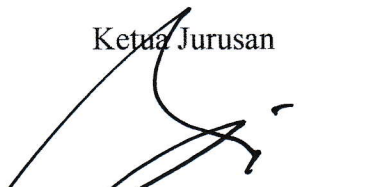
1. 
2. 
3. 

Mengesahkan,

Wakil Ketua 1
Bidang Akademik

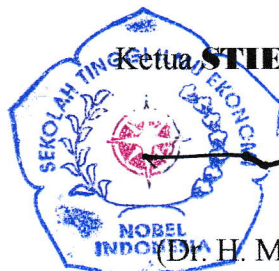

(Dr. Ahmad Firman, S.E., M.Si)

Ketua Jurusan


(Indrawan Azis, S.E., M.Ak)

Mengetahui

Ketua **STIE** Nobel Indonesia Makassar



(Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muh.Fathur Rahman. R
NIM : 2018222432
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Korporasi
Judul : Analisis Hubungan Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan
Pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 26 Oktober 2020

Yang Menyatakan,



Muh. Fathur Rahman. R
NIM. 2018222432

ABSTRAK

Muh. Fathur Rahman R. 2020. Analisis Hubungan Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dibimbing oleh H. Abdul Rauf.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah belanja modal memiliki hubungan dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah daerah Kabupaten Selayar.

Data yang dianalisis bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan atau APBD Kabupaten Selayar. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan analisis korelasi Product Moment Pearson.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki hubungan positif dan kuat dengan belanja pemeliharaan. Yang berarti bahwa keputusan pemerintah daerah untuk menaikkan jumlah anggaran belanja modal tidak disertai dengan peningkatan jumlah alokasi dana untuk belanja pemeliharaan.

Kata kunci: Belanja modal, belanja pemeliharaan, anggaran, pemerintah daerah



ABSTRACT

Muh. Fathur Rahman R. 2020. *Analysis of the Relationship between Capital Expenditures and Maintenance Expenditures at the Regional Government Budget of Selayar Islands Regency, supervised by H. Abdul Rauf.*

This study aims to provide empirical evidence whether capital expenditure has a relationship with maintenance spending in the local government of Selayar Regency. The data source analyzed from the Regional Government Financial Report (LKPD) and the Regional Budget of Selayar Regency. The data obtained were then processed using Pearson Product Moment correlation analysis.

The results of the study indicate that capital expenditure has no positive relationship with maintenance spending. This means that the regional government's decision to increase the amount of the capital expenditure budget is not accompanied by an increase in the amount of funds allocated for maintenance expenditure.

Keywords: *capital expenditure, maintenance spending, budget, local government*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Tidak ada yang memungkiri betapa pentingnya peranan infrastruktur dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan *output* ekonomi daerah tersebut (Hall, 2009). Oleh karena itu, tiap daerah sekarang ini seolah-olah berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Di Indonesia, sendiri pembangunan infrastruktur mendapat perhatian khusus, sehingga dalam RPJM tahun 2010 – 2014 pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimilikinya (Setiawan, 2005).

Untuk memperoleh suatu infrastruktur, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menganggarkannya dalam kelompok belanja modal. Proses penganggaran belanja modal termasuk unik. Proses ini tidak hanya melibatkan negosiasi di antara pihak eksekutif, tetapi juga sangat bergantung pada masukan dan saran dari insinyur, arsitek, dan perencana. Selain itu, dalam penganggaran belanja modal, pemerintah daerah juga harus memperhatikan perencanaan keuangan jangka panjang terutama untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut (Abdullah dan Halim, 2006).

³² Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 53, adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

³³ Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah. ³⁴ Sebelumnya proses penentuan besarnya alokasi sumber daya untuk tiap pos belanja lebih didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan pada jumlah anggaran. Pendekatan ini disebut sistem penganggaran *line item and incremental budgeting*. Akan tetapi sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah mulai melaksanakan perombakan pada proses penganggaran. Pendekatan anggaran yang digunakan bukan lagi pendekatan *line item and incremental budgeting* tetapi diganti dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Jika pada pendekatan *line item and incremental budgeting* fokus utamanya adalah *input* maka pendekatan anggaran berbasis kinerja fokusnya lebih ditekankan pada *output* dan *outcome* organisasi sehingga dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik (Bastian, 2006:171).

³⁵ Sejalan perubahan peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. ³⁶ Terlepas dari peraturan

perundangan tersebut pengalokasian sumberdaya ke dalam anggaran belanja proyek pembangunan atau belanja modal (*capital expenditure*) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Pada dasarnya pengalokasian anggaran pada kelompok belanja modal dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal tendensi distorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefe dan Khemani, 2003; Ablo dan Reinikka, 1998 dalam Abdullah dan Halim, 2006). Pada prakteknya daerah seringkali menganggarkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan yang dibutuhkan masyarakat tidak ditangani.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001 dalam Abdullah dan Halim, 2006). Hal ini berarti bila suatu daerah berencana untuk menganggarkan belanja modal pada anggaran belanjanya pemerintah tersebut juga harus punya komitmen untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi atas aset tetap yang diperolehnya dari belanja modal tersebut.

Secara teoritis belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki hubungan erat. Bagaimanapun belanja pemeliharaan hanya akan muncul bila ada "sesuatu" yang harus dipelihara dan "sesuatu" itu adalah aset tetap. Aset tetap ini biasanya muncul sebagai hasil dari terealisasinya belanja modal pada anggaran belanja pemerintah. Namun demikian, tidak semua aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah berasal dari realisasi APBN/APBD.

Aset tetap dapat diperoleh dari dua sumber yakni dari APBN/APBD dan dari luar pelaksanaan APBN/APBD. Aset tetap yang diperoleh dari luar APBN/APBD biasanya berasal dari pemberian pihak lain seperti lembaga donor dan masyarakat. Suatu aset tetap mungkin saja diterima oleh pemerintah sebagai hadiah/donasi dari pihak swasta. Tanah mungkin dihadiahkan kepada pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*). Perolehan aset dengan cara seperti ini tentu saja tidak akan membebani APBN/APBD pada kelompok belanja modal. Namun disisi lain, beban anggaran pada kelompok belanja pemeliharaan tetap akan terbebani.

Hal ini yang sering muncul di lapangan adalah adanya kecenderungan pemerintah mengalokasikan belanja pemeliharaannya bukan berdasarkan pada nilai aset tetap yang dimilikinya. Hal ini terlihat ketika dalam proses penyusunan APBN/APBD pemerintah tidak melihat nilai aset tetap sebagai dasar penentuan belanja pemeliharaan. Bahkan ada daerah yang belum memiliki neraca awal yang notabene digunakan sebagai dasar untuk mengetahui besarnya aset tetap yang dimiliki. Tidak sedikit pula daerah-daerah yang tetap mengalokasikan dana untuk

pemeliharaan aset yang sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi atau bahkan sudah hilang (Abdullah, 2004).

Beberapa studi terkait hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan telah dilakukan. Penelitian Abdullah dan Halim (2006) menemukan bahwa alokasi untuk belanja modal berasosiasi positif terhadap belanja pemeliharaan untuk konteks pemerintah daerah di Indonesia, terutama setelah otonomi daerah dilaksanakan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2009) yang mengemukakan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemeliharaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Karo-Karo (2006) menemukan bahwa tidak terdapat korelasi di antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Ia menemukan bahwa ketika pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran belanja modal, tidak diiringi dengan pengalokasian untuk belanja operasional dan pemeliharaan yang seimbang.

Hal yang sama dikemukakan oleh Blaud dan Nunn (1992). Dalam penelitian tersebut, mereka mengemukakan bahwa meskipun para manajer di sektor publik, termasuk pemerintah, menyadari bahwa realisasi belanja modal memiliki konsekuensi akan adanya belanja pemeliharaan, tetapi dalam pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal dan belanja pemeliharaan biasanya dilaksanakan secara terpisah. Hal ini seolah-olah menunjukkan tidak ada kaitan antara belanja modal dengan belanja operasional dan pemeliharaan.

Sementara Kamensky (1984) dalam Abdullah dan Halim (2006) berargumentasi perlunya menghubungkan keputusan belanja modal dengan keputusan belanja operasional. Dengan kata lain bahwa pengalokasian belanja modal ditengarai memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja pemeliharaan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menguji hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data rekening anggaran belanja modal tahun anggaran 2013 sampai dengan belanja pemeliharaan tahun anggaran 2018 pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah "apakah belanja modal pada tahun sebelumnya (2013) memiliki hubungan dengan belanja pemeliharaan sampai pada beberapa tahun berikutnya (2018) pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar?"

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan hubungan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai studi komparatif bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya obat-obatan ilegal.

~~REVISI~~ TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya untuk memperahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Syariful, 2010). Menurut Halim (2004:72) belanja modal merupakan belanja yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta menimbulkan konsekuensi bertambahnya belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Aset tetap yang diperoleh sebagai hasil terealisasinya belanja modal tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Munir (2003:36) juga menyatakan hal senada. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (Bland dan Nunn, 1992).

Pada dasarnya pengalokasian anggaran untuk belanja modal dimaksudkan untuk menambah aset tetap pemerintah. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana publik, baik untuk kelancaran

pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk menambah fasilitas publik. Biasanya tiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara keuangan. Menurut Halim (2004:72) belanja modal dibagi menjadi dua kelompok utama yakni :

1. Belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya, pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa dan pembelian mobil ambulans.
2. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya, pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintah, pembangunan rumah dinas.

Belanja modal sendiri termasuk salah satu jenis belanja yang memiliki karakteristik spesifik terutama terkait pengalokasiannya (Abdullah dan Halim, 2006). Penganggaran belanja modal tidak hanya melibatkan perundingan di antara pihak eksekutif, tetapi juga sangat bergantung pada masukan dari perencana dan arsitek. Selain itu, pengalokasian dana untuk belanja modal juga harus memperhatikan aspek kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk jangka panjang terutama untuk pemeliharaan aset tetap yang diperoleh dari belanja modal tersebut.

Pengeluaran untuk belanja modal harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin. Hal ini disebabkan karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran

rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membagi anggaran tahun-tahun berikutnya.

Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap yakni dengan membangun sendiri, menukarnya dengan aset tetap lainnya atau dengan membeli. Khusus di lingkup pemerintah cara yang biasa dilakukan adalah dengan membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilaksanakan melalui proses tender atau lelang yang cukup rumit dan terkadang seras akan kepentingan politis (Abdullah dan Halim, 2006).

Munculnya aset tetap sebagai hasil dari terealisasinya anggaran belanja modal memiliki konsekuensi munculnya belanja pemeliharaan pada masa yang akan datang. Namun demikian, perlu diperhatikan karena ada beberapa belanja pemeliharaan yang memenuhi persyaratan sebagai belanja modal (Syarif, 2010), yaitu apabila (a) pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki dan (b) pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan No. PER 33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akan pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan bagan akun standard, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap, atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.

2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual, tetapi digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari.

Dalam Buletin Teknis No. 4 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dikemukakan bahwa belanja modal meliputi belanja untuk memperoleh tanah, gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, jalan, jembatan, dan irigasi, serta belanja modal fisik lainnya.

3. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian, penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pembuatan sertifikat dan pengurusan lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah tersebut dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan dan penambahan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan, sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi

Adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penggantian, pembangunan, serta perawatan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembangunan, serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja yang masuk dalam kategori ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang perbukala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.1.2. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam kondisi yang normal tanpa memperhatikan besar atau kecil aset tersebut (Syaiiful, 2010). Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya (Halim, 2004). Belanja pemeliharaan yang dikeluarkan yang tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat, dan atau kemungkinan besar tidak

memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standard kinerja tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan (Syaiful, 2010).

² Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam penghitungan biaya depresiasi aset tetap (Abdullah dan Halim, 2006). Artinya, jika aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun. Demikian pula, jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester.

³ Belanja pemeliharaan adalah belanja yang bersifat rutin yang terdapat pada semua satuan kerja atau pemerintah daerah yang memiliki aset, sehingga penentuan besarnya anggaran belanja pemeliharaan setiap tahunnya tergantung pada banyaknya aset yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Meskipun demikian, pada kenyataannya di lapangan pemerintah daerah tidak selalu ¹ mengalokasikan belanja pemeliharaannya berdasarkan aset tetap yang dimilikinya. Hal ini terlihat ketika dalam proses penyusunan APBD, banyak pemerintah daerah yang tidak melihat besaran nilai aset tetapnya sebagai dasar penentuan belanja pemeliharaan mereka. Bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang belum mempunyai neraca awal sebagai dasar ⁴ pengalokasian belanja pemeliharaan.

2.1.3. Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2011 dalam Abdullah dan Halim, 2006). Hal ini berarti bahwa suatu daerah berencana untuk menganggarkan belanja modal pada anggaran belanjanya, pemerintah tersebut juga harus punya komitmen untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi atas aset tetap yang diperolehnya dari belanja modal tersebut.

Dalam perspektif manajemen keuangan dan akuntansi, selain diperhitungkan *cost* untuk penggunaan aset tersebut dalam operasional organisasi dalam bentuk depresiasi, juga harus diperhitungkan *cost* untuk pemeliharaan aset tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan kegunaannya. Biaya pemeliharaan dikeluarkan secara rutin atau berulang-ulang setiap tahun (*recurrent*) atas aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan tapi untuk memberikan layanan pada masyarakat selama bertahun-tahun. Menurut *Government Accounting Standards Board*, investasi merupakan aset yang diperoleh dari pengeluaran modal yang memiliki dua dimensi:

yang dapat berupa pembelian barang, pembelian layanan, "utang modal", "utang pemerintah" atau lainnya yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran modal oleh pemerintahan, khususnya, dalam hal ini, pemerintah daerah, merupakan tindakan yang bersifat investasi yang dilakukan pemerintah untuk menambah aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut dapat dipertahankan secara fisik. Menurut Kurniawan (2010), belanja modal memiliki konsekuensi diperolehnya aset tetap (*fixed asset*) pada saat belanja tersebut direalisasi sepenuhnya atau *output*-nya sudah diperoleh. Hal ini bermakna adanya penambahan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut Kurniawan (2010), pengeluaran pemerintah tidak hanya dipergunakan untuk membeli aset tetap dan pembelian yang juga dipergunakan oleh pemerintah untuk membeli aset tidak berwujud. Belanja modal dan belanja pemerintah dibedakan dengan cara belanja, dalam rangka belanja modal pemerintah hanya bersifat penggantian terhadap pengeluaran sebelumnya. Hal ini berbeda dengan belanja dan biaya di mana pengeluaran pemerintah tidak ada penggantian modal melalui pembelian dan dapat mencakup jangka waktu yang lama. Hal ini berarti bahwa belanja modal yang telah memiliki pengaruh terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah.

Belanja modal memiliki konsekuensi diperolehnya aset tetap (*fixed asset*) pada saat belanja tersebut direalisasi sepenuhnya atau *output*-nya sudah diperoleh. Hal ini bermakna adanya penambahan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut Kurniawan (2010), pengeluaran pemerintah tidak hanya dipergunakan untuk membeli aset tetap dan pembelian yang juga dipergunakan oleh pemerintah untuk membeli aset tidak berwujud. Belanja modal dan belanja pemerintah dibedakan dengan cara belanja, dalam rangka belanja modal pemerintah hanya bersifat penggantian terhadap pengeluaran sebelumnya. Hal ini berbeda dengan belanja dan biaya di mana pengeluaran pemerintah tidak ada penggantian modal melalui pembelian dan dapat mencakup jangka waktu yang lama. Hal ini berarti bahwa belanja modal yang telah memiliki pengaruh terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah.

Belanja modal tidak hanya berkaitan dengan pembelian aset fisik yang bisa diukur, namun meliputi juga pembelian aset tidak berwujud yang sifatnya dapat bertahan lama. Menurut Kurniawan (2010),

belanja modal tidak bisa dipisahkan dari belanja operasional. Anggaran tersebut harus dinilai baik dari segi modal maupun dari biaya operasional. Ketika membeli suatu item, pemerintah harus mempertimbangkan tidak hanya harga awalnya, tetapi juga biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan item tersebut.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal tidak selalu terpisah dengan pengalokasian belanja operasional. Pagano (1984) dalam Bland dan Nunn (1992) berpandangan perlunya menghubungkan di antara keduanya. Dia menyatakan:

Over time, crosswalking of capital budget expenses to operating expenses has eroded, in part due to the separateness of the deliberations of these budget. State and local governments usually schedule separate budget hearings for the operating budget and for the capital budget... decisions for each set of outlays, then, are made separately.

Thomassen (1990) juga memberikan catatan penting bagi penganggaran belanja modal ini. Ia menyatakan bahwa paling tidak setengah dari *state* yang melaporkan item belanja modal dan non belanja modal secara terpisah gagal menggabungkan anggarannya untuk melakukan evaluasi secara simultan dan komparatif untuk kedua item belanja tersebut.

Proses penyusunan anggaran pada pemerintah daerah sendiri mencakup dua komponen belanja yang memiliki siklus berbeda, yakni siklus anggaran operasional yang menghasilkan rencana keuangan bagi aktivitas pemerintahan yang berjalan terus menerus dan siklus anggaran belanja modal, yang merupakan perencanaan untuk mendapatkan peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya (Bland dan Nunn, 1992).

Meskipun kedua belanja memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan pelayanan kepada publik, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Keduanya relatif independen satu sama lain, termasuk dalam format dokumen anggarannya. Alokasi belanja modal biasanya didasarkan pada kebutuhan tiap satuan kerja dalam arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Pengalokasian belanja modal disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing satuan kerja. Ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan. Sementara itu, satuan kerja yang lainnya hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

Berbeda dengan belanja modal, belanja pemeliharaan terjadi pada semua satuan kerja atau unit organisasi pemerintah daerah, karena semua memiliki aset tetap. Karena bersifat rutin, belanja pemeliharaan tidak tergantung pada tupoksi satuan kerja, tetapi pada jumlah aset yang dimiliki.

Perbedaan lainnya adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Meskipun keduanya melibatkan negosiasi di antara eksekutif, bagian anggaran, dan pimpinan dinas, khusus untuk pengeluaran modal (khususnya untuk infrastruktur), mendapat masukan sangat besar dari insinyur, arsitek, dan perencana. Sumber pendanaan (*funding*) untuk kedua belanja juga berbeda.

Belanja modal biasanya didasarkan pada *one-time sources*, seperti obligasi atau dari dana bantuan, sementara anggaran operasional umumnya berasal dari sumber pendapatan yang bersifat rutin, seperti pajak (*taxes*) dan retribusi (*service charges*). Perbedaan berikutnya adalah *time-frame* yang dimasukkan dalam setiap anggaran. Anggaran operasional biasanya hanya dianggarkan untuk satu tahun anggaran, sementara hampir semua belanja modal mengandung komitmen adanya pengeluaran dalam waktu melebihi satu tahun (Abdullah dan Halim, 2006).

Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, seperti belanja operasional dan pemeliharaan. Namun, tidak berarti belanja modal selalu sebagai penyebab atau *predictor* bagi kenaikan belanja operasional. Beberapa argumen yang menyatakan perlunya kehati-hatian dalam melihat hubungan belanja modal dan belanja operasional dan pemeliharaan diuraikan berikut ini (Bland dan Nunn, 1992).

Pertama, pengaruh belanja modal terhadap belanja operasional dan pemeliharaan tidak seragam karena tergantung pada apakah belanja modal tersebut dianggarkan sebagai kebijakan untuk menggantikan tenaga manusia (*labor*) dengan mesin (*capital*), atau semata-mata untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah melalui pembangunan fasilitas yang baru. *Kedua*, pengaruhnya bervariasi di antara berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, tergantung pada sifat pelayanan tersebut: apakah padat modal atau padat karya.

Ketiga, adanya kesenjangan waktu (*lag of time*) antara realisasi belanja modal dan pengaruhnya yang terasa dalam kenaikan atau perubahan dalam

belanja operasional dan pemeliharaan yang berbeda di antara berbagai bentuk pelayanan. Keempat, hubungan investasi modal kemungkinan ditutupi oleh kehadiran *budget slack* (*excess resources*) dalam suatu pelayanan publik, khususnya jika *slack* tersebut digunakan untuk meningkatkan biaya yang muncul dari peningkatan belanja modal. Terakhir, mengukur *magnitude* dan *timing* belanja modal merupakan pekerjaan yang rumit, karena tidak lengkapnya data dan tidak terhitungnya kontribusi pihak swasta dalam pengadaan infrastruktur pemerintah daerah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Studi terkait hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan telah banyak dilakukan. Bland dan Nunn (1992) memaparkan bahwa terdapat perbedaan dalam proses pembuatan keputusan pengalokasian antara anggaran belanja modal dengan anggaran belanja pemeliharaan. Perbedaan tersebut terjadi karena sifat kedua belanja yang berbeda. Belanja modal adalah belanja variabel, yakni belanja yang terjadi karena adanya kebutuhan atau aktivitas untuk menghasilkan aset tetap, sementara belanja pemeliharaan bersifat rutin dari tahun ke tahun, sesuai dengan keadaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah.

Studi Bland dan Nunn (1992) juga memberikan bukti empiris yang cukup lengkap tentang hubungan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan. Meskipun para manajer di sektor publik, termasuk pemerintahan, menyadari bahwa realisasi belanja modal memiliki konsekuensi akan adanya belanja pemeliharaan, tetapi pembuatan keputusan pengalokasian dana untuk belanja modal dan belanja pemeliharaan merupakan hal yang terpisah. Hal ini

menunjukkan seolah-olah tidak ada kaitan antara belanja modal dengan belanja operasional dan pemeliharaan.

Berdasarkan temuan Bland dan Nunn (1992), prediksi atas pola hubungan belanja modal-belanja operasional dan pemeliharaan tergantung pada beberapa faktor, seperti sifat dari belanja modal bersangkutan (sebagai pengganti aset tetap yang telah ada atau sebagai peningkatan kapasitas). Mereka berpandangan bahwa belanja modal akan berpengaruh terhadap belanja operasi dan pemeliharaan setahun ke depan dan mungkin saja hal ini bermakna adanya upaya pemerintah daerah untuk meringkaskan kapasitas pelayanan kepada publik. Artinya, konsekuensi fiskal belanja modal adalah signifikan dan dampaknya terhadap belanja pemeliharaan dan operasional dapat terasa selama beberapa tahun ke depan.

Thomassen (1990) dalam Abdullah dan Halim (2006) juga memberikan catatan penting bagi penganggaran belanja modal ini. Ia menyatakan bahwa paling tidak setengah dari *state* yang melaporkan item belanja modal dan non belanja modal secara terpisah gagal menggabungkan anggarannya untuk melakukan evaluasi secara simultan dan komparatif untuk kedua item belanja tersebut.

Studi tentang hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan di Indonesia telah dilakukan beberapa kali. Sebuah studi yang dilakukan oleh Karo-Karo (2006) menemukan bahwa tidak terdapat korelasi di antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Dia menggunakan sampel kabupaten/kota di pulau Jawa untuk anggaran 2003 - 2004 dan menemukan bahwa ketika pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran belanja modal, tidak

diringi dengan pengalokasian untuk belanja operasional dan pemeliharaan yang seimbang. Diduga penyebabnya adalah tidak akuratnya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran terhadap proyek/kegiatan.

¹ Abdullah dan Ha'im (2006) dalam studinya menemukan bahwa alokasi untuk belanja modal berasosiasi positif terhadap alokasi belanja pemeliharaan untuk konteks pemerintah daerah di Indonesia, terutama setelah otonomi daerah dilaksanakan. Dalam penelitiannya ini mereka menggunakan sampel 32 pemerintah kabupaten/kota yang ada di pulau Sumatera dengan menggunakan data tahun anggaran 2003 dan 2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengalokasian belanja modal pemerintah daerah mengantisipasi konsekuensi kenaikan belanja modal terhadap kenaikan belanja pemeliharaan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa perubahan belanja modal merupakan penyebab utama kenaikan aset tetap. Walaupun ada perubahan aset tetap yang bersumber dari non-belanja modal atau non-APBD, perubahan tersebut tidak terlalu signifikan pengaruhnya.

² Sembiring (2009) dalam studinya menganalisis pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemeliharaan. Sebagai sampel dalam penelitiannya Sembiring menggunakan 15 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara sebagai sampelnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemeliharaan. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah secara individu berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan. Namun, belanja modal memiliki pengaruh yang paling besar

terhadap belanja pemeliharaan pada kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Penelitian lain dilakukan oleh Abdullah (2007). Dalam penelitiannya, Abdullah berusaha untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Lebih lanjut ia mencoba membandingkan hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan di pulau Jawa dengan di luar pulau Jawa. Data yang dianalisis adalah data tahun anggaran 2003 dan 2004. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa belanja modal tahun 2003 tidak mempunyai korelasi dengan belanja pemeliharaan 2003 untuk wilayah pulau Jawa, tetapi mempunyai korelasi positif bagi wilayah luar pulau Jawa.

Sementara itu, hubungan antara belanja modal 2003 dan belanja pemeliharaan 2004 mempunyai korelasi yang cukup kuat baik di pulau Jawa maupun luar pulau Jawa. Artinya, pemerintah daerah mampu memprediksikan belanja pemeliharaan untuk aset yang dimiliki pada awal/pertengahan tahun anggaran berjalan dan juga memikirkan alokasi belanja pemeliharaan untuk aset yang telah dicoret pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, hasil analisis belanja modal 2004 dan belanja pemeliharaan 2004 menunjukkan bahwa di daerah pulau Jawa dan luar pulau Jawa tidak memiliki korelasi, begitu juga untuk total selisih belanja modal dan selisih belanja pemeliharaan tidak memiliki korelasi. Artinya, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran belanja modal tidak dibarengi dengan alokasi anggaran untuk belanja pemeliharaan. Hubungan belanja modal dengan

belanja pemeliharaan antara daerah pulau Jawa dan daerah luar pulau Jawa berbeda secara signifikan, yaitu di daerah pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan daerah luar pulau Jawa.

Sementara itu sebuah studi yang dilakukan oleh Ahmad (2008) di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa alokasi belanja pemeliharaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni alokasi belanja modal tahun sebelumnya, dan metode penghitungan belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan juga memiliki hubungan yang kuat terhadap belanja modal tahun sebelumnya. Sebagai sebuah penelitian kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif, penulis menganalisa realitas dan membandingkannya dengan teori yang ada. Data yang diolah adalah data keuangan dengan alat analisis *correlation matrix* yang dipadukan dengan observasi data dokumen dan teori. Dalam hasil penelitiannya, Ahmad mengemukakan bahwa pengalokasian belanja pemeliharaan menggunakan metode *actual expenditure*.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun untuk mengetahui hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan di mana ada indikasi bahwa jumlah dana yang dianggarkan pada belanja modal akan secara langsung mempengaruhi jumlah anggaran untuk belanja pemeliharaan. Belanja modal adalah belanja yang dianggarkan untuk memperoleh aset tetap pada tahun berjalan. Belanja ini mungkin bisa dilaksanakan pada masa depan atau pada

pendiri perusahaan adalah karyawan. Jadi, saat orang lain telah ada pada perusahaan tersebut,

dimaksudkan bisa dengan pemeliharaan terhadap tenaga kerja. Hal yang akan sangat penting dalam perusahaan saat ini adalah tenaga kerja yang dapat bekerja dengan baik dan efisien. Untuk itu, perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Jika lingkungan perusahaan baik, maka akan sangat penting bagi perusahaan untuk dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Jika lingkungan perusahaan baik, maka akan sangat penting bagi perusahaan untuk dapat bekerja dengan baik.

3.2. **Manajemen Investasi**



Manajemen investasi adalah salah satu bagian dari manajemen keuangan yang berkaitan dengan alokasi dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi adalah mengalokasikan dana saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, dan individu dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Hal ini berarti bila suatu daerah berencana untuk menganggarkan belanja modal pada anggaran belanjanya, pemerintah-

tersebut juga harus punya komitmen untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi atas aset tetap yang diperolehnya dari belanja modal tersebut.

Alokasi untuk belanja modal biasanya didasarkan pada kebutuhan tiap satuan kerja. Hal ini berarti tidak semua satuan kerja melakukan pengadaan aset tetap. Hal berbeda terjadi pada belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang bersifat rutin yang terdapat pada semua satuan kerja yang memiliki aset, sehingga penentuan besarnya anggaran belanja pemeliharaan tiap tahunnya bergantung pada banyaknya aset yang dimiliki oleh satuan kerja bersangkutan.

Berdasarkan temuan Bland dan Nunn (1992), prediksi atas pola hubungan belanja modal-belanja operasional dan pemeliharaan tergantung pada beberapa faktor, seperti sifat dari belanja modal bersangkutan (sebagai pengganti aset tetap yang telah ada atau sebagai peningkatan kapasitas). Mereka berpandangan bahwa belanja modal akan berpengaruh terhadap belanja operasi dan pemeliharaan setahun ke depan dan mungkin saja hal ini bermakna adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada public. Artinya, konsekuensi fiskal belanja modal adalah signifikan dan dampaknya terhadap belanja pemeliharaan dan operasional dapat terasa selama beberapa tahun ke depan.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Karo-Karo (2006) menemukan bahwa tidak terdapat korelasi di antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Studi lain yang dilakukan Kamensky (1984) dalam Abdullah dan Halim (2006) menyatakan bahwa perlunya menghubungkan keputusan belanja modal dengan keputusan belanja operasional. Dengan kata lain bahwa pengalokasian belanja

modal ditenggarai memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja pemeliharaan. Berdasarkan gagasan tersebut, dapat ditarik hipotesis hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan sebagai berikut:

H₁ : Belanja modal pada tahun ~~2012-2013~~ sebelumnya ~~2012-2013~~ memiliki hubungan ~~positif~~ dengan belanja pemeliharaan tahun ~~2012-2013~~ berikutnya ~~2012-2013~~.

BAB III Pembahasan dan Kesimpulan

3.1. Contoh Rancangan Anggaran

Perencanaan keuangan adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menetapkan tujuan keuangan, mengalokasikan sumber daya, dan memantau kinerja keuangan. Berikut ini adalah contoh Rancangan Anggaran yang dapat digunakan sebagai acuan.

3.2. Rincian Penganggaran Biaya

Salah satu aspek penting dalam penganggaran adalah rincian pengeluaran. Berikut ini adalah rincian pengeluaran yang dapat digunakan sebagai acuan.

Rincian pengeluaran ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah anggaran yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan organisasi. Rincian pengeluaran ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah anggaran yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan organisasi.

Perencanaan keuangan yang baik dapat membantu organisasi mencapai tujuan keuangan. Berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan perencanaan keuangan.

1. Tetapkan tujuan keuangan yang jelas dan terukur.

2. Lakukan analisis biaya-biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

3. Buatlah anggaran yang realistis dan dapat diandalkan.

4. Pantau kinerja keuangan secara berkala.

5. Lakukan evaluasi dan penyesuaian anggaran secara berkala.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Strauss dan Corbin, 1997). Dalam penelitian ini yaitu melakukan tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti, yang dimaksud subjek disini yaitu Kepala Bidang Bagian Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Data kuantitatif adalah data yang bersumber objek, berupa data-data kuantitatif perusahaan atau organisasi dalam penelitian ini yaitu data rekening anggaran belanja modal 2013 sampai dengan tahun 2017 dan belanja pemeliharaan tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019 pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Partisipasi aktif akan menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak tertentu. Dalam sumber data penelitian ini adalah data pemerintahan kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik.

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang penulis ajukan adalah korelasi Pearson *Product Moment*, uji signifikansi korelasi, dan koefisien determinasi. Analisis korelasi berguna untuk menentukan

menjadi ukuran yang sangat penting bagaimana besar hubungannya suatu variabel dengan variabel lainnya (Umar, 2004:132).

1c Korelasi Pearson *Product Moment*

Korelasi Pearson *Product Moment* digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama (Yunigunarto, 2006). Berikut ini rumus korelasi *product moment* :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Kelompokan nilai koefisien korelasi
berdasarkan Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
> 0 - 0,25	Sangat lemah
> 0,25 - 0,5	Cukup
> 0,5 - 0,75	Kuat
> 0,75 - 0,99	Sangat kuat

Sumber: (Sarwono, 2006)

Nilai koefisien korelasi r berkisar antara -1 sampai +1 yang kriteria pemanfaatannya sebagai berikut :

1. Jika nilai $r > 0$ artinya telah terjadi hubungan/korelasi positif, yaitu makin

terjadi nilai koefisien korelasi yang positif, maka nilai variabel X yang semakin besar akan mengakibatkan nilai variabel Y yang semakin besar. Sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi bernilai negatif, maka akan mengakibatkan terjadinya nilai variabel Y yang semakin kecil.

2. Jika nilai $r < 0$ artinya telah terjadi korelasi negatif, yaitu makin kecil nilai variabel X (independen), maka makin besar nilai variabel Y (dependen). Semakin dekat nilai koefisien korelasi ke -1 semakin kuat korelasi negatifnya.
3. Jika nilai $r = 0$ artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dan variabel dependen.
4. Jika nilai $r = 1$ atau $r = -1$ telah terjadi hubungan sempurna positif/negatif yang sempurna.

Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifikansi korelasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui

kepentingan statistik uji r , dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Berapapun parameter uji korelasi dengan angka pembulatan tabel signifikansi.

Interpretasi koefisien korelasi r :

- > Jika r lebih besar dari nilai parameter uji korelasi.
- > Jika r lebih kecil dari nilai uji korelasi, maka nilai korelasi.

10 Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi, rumusnya (Sarwono, 2006) sebagai berikut:

$$K_d = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

K_d = nilai koefisien determinasi

r = nilai koefisien korelasi

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada suatu nilai (Sekaran, 2006 dalam Nurcahyani, 2010). Dalam penelitian ini digunakan dua macam variabel penelitian, yakni variabel terikat dan variabel bebas.

1. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang memberikan pengaruh baik positif maupun negative terhadap variabel lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah kabupaten kepulauan Selayar. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja

modal sebagai variabel independen dan belanja pemeliharaan sebagai variabel dependen.

3.5.1. Variabel Independen

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa-manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dibagi dalam dua kelompok utama, yakni belanja publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan belanja aparatur yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat, tetapi dirasakan oleh aparatur.

3.5.2. Variabel Dependen

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Pemeliharaan. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang bersifat rutin yang terdapat pada semua satuan kerja, atau pemerintah daerah yang memiliki aset, sehingga penentuan besarnya anggaran belanja pemeliharaan setiap tahunnya tergantung pada banyaknya aset yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja atau pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB IV

LEMBANG KAWAHLAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki posisi yang cukup strategis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan yang merupakan perhitungan nilai tambah setiap sektor ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2018 mencapai 5.85 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,63 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 0,56 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 3.15 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 3,42 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,77%. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, PDRB per kapita tercatat sebesar 27,14 juta rupiah. Kemudian secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 43,6 juta

rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Hal ini disebabkan pertambahan pertumbuhan di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga nilai dari KIP Kabupaten oleh faktor di Selayar ini juga.

Mayoritas penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Kepulauan Kepulauan Selayar bertumbuh signifikan hingga mencapai lebih melampaui pada tahun 2014-2017. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran terapan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2014, yaitu 75,40% dan 10,40% pada tahun 2017, TPAK yaitu 70,00% dan 10,00% pada tahun 2017. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran terapan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2017 mencapai 70,00% dan 10,00% pada tahun 2017. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran terapan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2017 mencapai 70,00% dan 10,00% pada tahun 2017. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran terapan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2017 mencapai 70,00% dan 10,00% pada tahun 2017. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran terapan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2017 mencapai 70,00% dan 10,00% pada tahun 2017.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten jasa, masih membutuhkan beragam infrastruktur di bidang perdagangan. Hal ini perlu dilakukan guna menunjang kegiatan impor dan ekspor yang telah menjadi ladang emas perdagangan di kabupaten Selayar. Berikut potensi investasi dalam sektor perdagangan. **1. Sektor pariwisata** sebagai penyumbang PAD terbesar bagi Kabupaten Kepulauan Selayar. Dunia pariwisata memiliki pasar yang sangat potensial, guna menunjang Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten berwisata.

internasional. Namun dilain sisi, Kabupaten ini masih memerlukan tambahan beragam infrastruktur.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Diantara komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan di sektor ini adalah Jeruk Keprok, Pisang, Melinjo dan Jagung. Pulau Selayar terkenal dengan produk buah-buahan terutama jeruk keproknya. Karena itu, di Kota Benteng yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar dipajang patung jeruk keprok sebagai simbol akan kebesaran jeruk di Selayar. Peluang pengembangan komoditas ini meliputi perluasan lahan budidaya. Sedangkan untuk komoditas jagung, total lahan yang dipanen seluas 1.817 Hektar dengan produksi jagung sebesar 6.289,9 ton atau rata-rata 3,5 ton per hektar. Peluang investasi yang tersedia meliputi perluasan lahan budidaya tanaman jagung.

Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi dalam gugusan pulau-pulau. Potensi pertanian dalam hal ini tanaman pangan dan perkebunan tersebar di Pulau Selayar dan Pulau Jampea. Pulau Jampea disebut sebagai gudang pangannya Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini disebabkan produksi beras dan hortikultura banyak dihasilkan dari Pulau Jampea. Di sektor perkebunan, komoditas utama yang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar berupa Kelapa Dalam, Jambu Mente, Kemiri, Pala, dan Kenari, Cengkeh. Untuk komoditas kelapa dalam, potensinya tersebar hampir di seluruh kecamatan dengan luas areal mencapai 19.952 Hektar dan produksi kelapa sebesar 27.096,95 ton. Peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan meliputi pembangunan unit pengolahan kelapa

terpadu, pengembangan komoditas kelapa dalam dan perluasan areal tanaman. Komoditas sektor perkebunan lainnya yang juga cukup prospektif untuk dikembangkan adalah jambu mete. Total areal penanaman jambu mete di Kabupaten Kepulauan Selayar seluas 3.609,50 Ha dengan produksi sebesar 1.434,21 ton. Komoditas ini juga dikembangkan hampir di seluruh kecamatan. Seperti halnya komoditas kelapa dalam, peluang investasi yang tersedia meliputi pembangunan unit pengolahan terpadu komoditas jambu mete, pengembangan komoditas, dan perluasan areal tanam. Komoditas kemiri banyak diusahakan di Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, Bontoharu, dan Bontosikuyu pada areal seluas 2.016 Ha dengan produksi sebesar 2.830,37 ton. Potensi investasi yang tersedia meliputi pembangunan unit pengolahan terpadu komoditas kemiri, pengembangan komoditas, serta perluasan areal tanaman. Komoditas Cengkeh banyak diusahakan di Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, Buki Bontoharu dan Bontosikuyu dengan areal seluas 1.006,00 Ha dengan produksi sebesar 509,89 ton. Potensi investasi yang tersedia meliputi pengembangan komoditas serta perluasan areal tanam. Pala dan kenari juga menjadi komoditas penting di sektor perkebunan. Kedua komoditas ini banyak diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pala komoditas banyak diusahakan di Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, Bontoharu, dan Bontosikuyu pada area 992 Ha dan produksi sebesar 743,6 ton. Sedangkan untuk komoditas Kenari banyak diusahakan di Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, dan Bontosikuyu pada lahan seluas 22 Ha dan dengan produksi sebesar 234,05 ton.

4.1.2. Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Gambaran atau deskripsi data tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai maksimum dan minimum dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah belanja modal tahun anggaran 2012 sampai dengan 2017 sebagai variabel independen dan belanja pemeliharaan tahun anggaran 2013 sampai dengan 2018 sebagai variabel dependen. Hasil uji statistik deskriptif secara keseluruhan ditunjukkan dalam Tabel 4.1 :

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel secara Keseluruhan

Deskripsi Data Penelitian				
	N	Minimum	Maksimum	Mean
Belanja Modal	6	25172239455	243169421340	169361276398,00
Belanja Pemeliharaan	6	8572239455	12510037944	3900339872,37

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

1. Belanja Modal

Data belanja modal pada pemerintah Kabupaten Keprikan Kabupaten menunjukkan bahwa yang paling rendah adalah belanja modal pada tahun anggaran 2012 yaitu sebesar Rp. 25.172.239.455 dan jumlah yang tertinggi adalah belanja modal pada tahun anggaran 2016 dengan jumlah Rp. 243.169.421.340.

2. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan yaitu pemeliharaan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan. (kemungkinan tidak yang tersedia adalah: belanja pemeliharaan yang antara lainnya 2012 yaitu sebesar Rp. 6.572.298.272 dan tahun yang selanjut adalah belanja pemeliharaan tahun anggaran 2013 dengan nilai Rp. 6.230.571.242.

3. Fungsi Uji

3.1. Fungsi Uji

Statistik korelasi kendall digunakan untuk melihat hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan dan selanjutnya akan dibahas lebih mendalam. Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson pada tabel 4.3 dapat diketahui selanjutnya adalah :

Tabel 4.3. Hasil Uji Korelasi Kendall

		Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal
Korelasi Kendall	Belanja Pemeliharaan	.504	.504
	Belanja Modal	.504	.504
Sig. (1-tailed)	Belanja Pemeliharaan	.	.004
	Belanja Modal	.004	.
N	Belanja Pemeliharaan	6	6
	Belanja Modal	6	6

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa tidak terdapat korelasi antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan sebesar 0,365 pada $\alpha = 0,05$ ($r_{\text{tabel}} = 0,729$; $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$). Hasil ini memberikan pemahaman bahwa tidak terdapat hubungan antara belanja modal tahun sebelumnya dan belanja pemeliharaan tahun berikutnya. Berarti bahwa keputusan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk belanja modal tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah anggaran belanja pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengantisipasi kenaikan anggaran belanja pemeliharaannya sebagai konsekuensi peningkatan aset tetap dari terealisasinya belanja modal.

4.2.2. Hasil Uji Signifikansi

Uji t merupakan uji statistik untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Uji t ini digunakan sebagai cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai t hitung $> t$ tabel, Ha diterima
2. Jika nilai t hitung $< t$ tabel, Ha ditolak

Hasil pengujian signifikansi dengan tabel berikut :

Tabel 4.3. Hasil Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8115878746. 970	2403253495. 788		3.377	.028
	Belanja Modal	.011	.014	.365	.784	.477

3
n. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan
Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2020

Pada tabel 4.3 dapat dilihat nilai t hitung sebesar 0,784. Pada penelitian ini derajat signifikansi (α) ditentukan sebesar 0,05, sedangkan *degree of freedomnya* (df) sebesar 4 ($df = n - 2$ dengan $n = 6$). Berdasarkan ketentuan ini maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,132. Didasarkan pada kriteria yang ditetapkan diatas, maka t_{hitung} 0,784 < t_{tabel} 2,132. Dengan demikian hasil analisis tersebut dinyatakan signifikan dan hipotesis yang diajukan (H_a) ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara belanja modal tahun sebelumnya dengan belanja pemeliharaan tahun anggaran berikutnya pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

4.2.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar varians variabel dependen dapat dijelaskan oleh varians atau perubahan variabel independen, atau dengan kata lain seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh belanja modal tahun sebelumnya

variabel lain yang dapat menjelaskan tentang belanjanya. Hasil pengujian yang diperoleh dari analisis ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.365 ^a	.133	-.084	1580660544.927

- a. Predictors: (Constant), Belanja Modal
 b. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan
 Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2020

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,133. Hal ini berarti bahwa hanya sebesar 13% dari variabel belanja pemeliharaan dapat dijelaskan oleh belanja modal, sedangkan sisanya sebesar 87% (100% - 13%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hubungan antara belanja modal tahun anggaran sebelumnya (2012 - 2017) dengan belanja pemeliharaan untuk tahun anggaran berikutnya (2013 - 2018) pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,365. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan yang kuat antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Angka ini juga menunjukkan bahwa hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan bersifat negatif, yang mempunyai maksud bila jumlah anggaran belanja modal dinaikkan, jumlah alokasi dana untuk belanja pemeliharaan tidak akan ikut meningkat. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar belum mampu

² mengantisipasi konsekuensi dari kenaikan jumlah belanja modal terhadap belanja pemeliharaan.

Hasil ini juga didukung dengan angka koefisien determinasi sebesar 0,133 atau 13%. Angka ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal tahun anggaran sebelumnya (2012 - 2017) tidak dapat mempengaruhi variabel belanja pemeliharaan tahun anggaran berikutnya (2013 - 2018), sedangkan sisanya sebesar 87% perubahan pada belanja pemeliharaan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil lain yang ditemukan dalam penelitian ini yang menunjukkan adanya hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan adalah angka signifikansi pada uji t di mana diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,784. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada derajat signifikansi (α) sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan secara signifikan tidak ada. Angka ini tidak mendukung diterimanya hipotesis yang diajukan.

Semua hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar belum mampu mengantisipasi konsekuensi kenaikan belanja pemeliharaan dari terealisasinya belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2006) mengemukakan bahwa terdapat asosiasi positif dan sangat kuat (*robust*) antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Hasil analisis mereka menunjukkan

bahwa perubahan belanja modal merupakan penyebab utama kenaikan aset tetap yang disebabkan oleh perubahan belanja dan walaupun ada perubahan yang bersumber dari luar belanja modal atau dari APBD lainnya, tidak dapat diabaikan pengaruhnya terhadap perubahan aset tetap pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan perubahan belanja modal pemerintah daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah besarnya belanja modal yang terus meningkat. Nilai aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah di tahun sebelumnya yang terus meningkat, berarti pemerintah daerah mengalami peningkatan aset tetap yang terus meningkat, berarti pemerintah daerah mengalami peningkatan aset tetap yang terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan perubahan belanja modal pemerintah daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan perubahan belanja modal pemerintah daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menguji hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2012 sampai pada tahun 2018. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah, khususnya bagian anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat dan positif antara belanja modal tahun anggaran 2012 sampai 2017 dan belanja pemeliharaan tahun anggaran berikutnya 2013 sampai 2018. Yang berarti bahwa keputusan pemerintah daerah untuk menaikkan jumlah anggaran belanja modal tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah alokasi dana untuk belanja pemeliharaan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut yaitu belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang konsekuensi adalah munculnya aset tetap dalam neraca pemerintah daerah. Besarnya aset tetap yang disajikan dalam neraca pada akhir tahun inilah yang kemudian akan menjadi dasar untuk pengalokasian belanja pemeliharaan.

Karena keterbatasan waktu, dalam penelitian ini aset tetap tidak dimasukkan dalam analisis.

5.3. Saran

Sehubungan dengan keterbatasan seperti yang disebutkan sebelumnya, maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Untuk penelitian dan studi selanjutnya agar dapat memperluas jangkauan pengambilan data ~~ke~~ wilayah pengambilan sampel maupun untuk tahun anggaran yang dijadikan sampel.
2. Untuk penelitian dan studi selanjutnya agar dapat mengikutsertakan nilai aset tetap dalam analisis datanya agar pengaruh aset tetap terhadap belanja pemeliharaan dapat diketahui.

13 DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2007. *Hubungan Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2003-2004*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.ugm.ac.id/index>. penelitian
- Abdullah, Syukriy. 2004. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah*. <http://syukriy.wordpress.com>
- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2006. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. www.swarnandiri.org
- Ahmad, Legianto. 2010. *Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)*. Tesis. Program MPKP Angkatan IX. <http://mpkp19.blogspot.com/2010/03/analisis-hubungan-belanja-modal-dan.html>
- Ardhana. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif. Tersedia: <http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/avik>. <http://staff.ums.ac.id/files/2009/10/jenis-penelitian-1.doc>
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2012. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012*. Selayar, BAPPEDA.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2013. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013*. Selayar, BAPPEDA.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2014. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014*. Selayar, BAPPEDA.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2015. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015*. Selayar, BAPPEDA.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2016. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016*. Selayar, BAPPEDA.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017*. Selayar, BAPPEDA.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2003. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar 2003. Jakarta, RAJINDIA.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Selayar, 2003. Data Statistik dan Pembangunan Regional Kota dan Kota Kabupaten Selayar 2003 - 2008. BPS Kota Selayar.

10

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta, Erlangga.

Bland, Robert dan Samuel Nunn. 1992. The impact of capital spending on Municipal operating budgets. *Public Budgeting & Finance* (Summer): 32-47.

11

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Karo-Karo, Syukur Selamat. 2006. *Hubungan belanja modal dengan belanja operasional di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Sarjana, Universitas Semarang.

Lana, Rizki Ulia. *Hubungan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dengan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem*. Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya.

Mandana, Nurrahmah. *Hubungan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dengan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem*. Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya.

Syahrudin, Nurrahmah. *Hubungan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dengan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem*. Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya.

Syahrudin, Nurrahmah. *Hubungan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dengan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem*. Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya.

Syahrudin, Nurrahmah. *Hubungan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dengan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem*. Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya.

Handwritten text, likely a title or heading, possibly mentioning "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text, possibly a date or location, mentioning "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text, possibly a name or title, mentioning "Handwritten text" and "Handwritten text".

Handwritten text, possibly a name or title, mentioning "Handwritten text" and "Handwritten text".

TABLE 7

Table 7: Data Distribution

Year	Country	Year	Country
2012	Fig. 15: 2012, 2013, 2014	2015	Fig. 16: 2015, 2016, 2017
2013	Fig. 16: 2013, 2014, 2015	2016	Fig. 17: 2016, 2017, 2018
2014	Fig. 17: 2014, 2015, 2016	2017	Fig. 18: 2017, 2018, 2019
2015	Fig. 18: 2015, 2016, 2017	2018	Fig. 19: 2018, 2019, 2020
2016	Fig. 19: 2016, 2017, 2018	2019	Fig. 20: 2019, 2020, 2021
2017	Fig. 20: 2017, 2018, 2019	2020	Fig. 21: 2020, 2021, 2022

Source: Author's calculations based on data from 2012-2022.

Lampiran 1. Matriks Uji Keabsahan Matriks

Uji Keabsahan

Indikator	DA	DA (Kategori)	Indikator (Kategori)	Uji Keabsahan (Kategori)
1	DA	DA	DA	DA

- a. Matriks Uji Keabsahan, Uji Keabsahan
- b. Matriks Uji Keabsahan, Uji Keabsahan

Uji Keabsahan

Indikator	DA	DA (Kategori)	Indikator (Kategori)	Uji Keabsahan (Kategori)
1	DA	DA	DA	DA

Uji Keabsahan

Indikator	Uji Keabsahan	
	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal
Belanja Pemeliharaan	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal
Belanja Modal	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal
Belanja Pemeliharaan	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal
Belanja Modal	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal

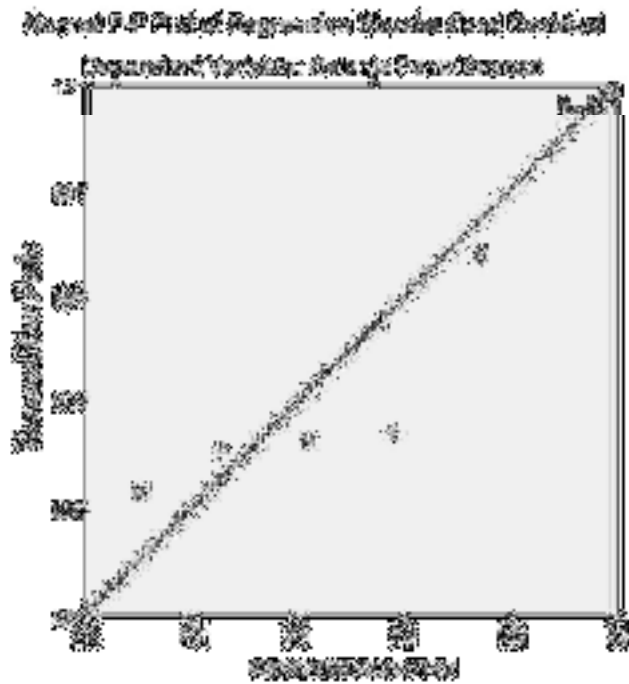
Indikator	DA	DA (Kategori)	Indikator (Kategori)	Uji Keabsahan (Kategori)
1	DA	DA	DA	DA

- a. Matriks Uji Keabsahan, Uji Keabsahan
- b. Matriks Uji Keabsahan, Uji Keabsahan

Kategori	Distribusi				Rangkai Distribusi		
	Kategori Rendah		Kategori Tinggi	f	Σfx	Lower Bound	Upper Bound
	R	High Score	High				
1. Rendah	10	10	10	30	300	100	200
2. Tinggi	10	10	10	30	300	200	300

a. Rangkai Distribusi Rendah dan Tinggi

2.3.1. Analisis Regresi



Skripsi Fathur

ORIGINALITY REPORT

59%

SIMILARITY INDEX

59%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unhas.ac.id

Internet Source

18%

www.bppk.depkeu.go.id

2

Internet Source **9%**

3

repository.usu.ac.id

Internet Source

6%

pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id

4

Internet Source **5%**

repository.unib.ac.id

5 Internet Source 3%

6 lib.unnes.ac.id

7 Internet Source 2%

lambungdata.solokkab.go.id

Internet Source 1%

portal.widyamandala.ac.id

8 Internet Source 1%

9 www.scribd.com

Internet Source 1%

a-research.upi.edu

10 Internet Source 1%

11	mpkp19.blogspot.com	Internet Source	1%
12	id.123dok.com	Internet Source	1%
13	jurnal.darmajaya.ac.id	Internet Source	1%
14	eprints.uny.ac.id	Internet Source	1%
15	Submitted to Sriwijaya University	Student Paper	1%
16	eprints.unm.ac.id	Internet Source	1%
17	repositori.uin-alauddin.ac.id	Internet Source	1%
18	anzdoc.com	Internet Source	1%
19	elib.unikom.ac.id	Internet Source	1%

20 digilib.iain-palangkaraya.ac.id 1%
Internet Source

eprints.iain-surakarta.ac.id

21 Internet Source 1%

cholil145.blogspot.com

22 Internet Source <1%

23 ejournal.stiesia.ac.id <1%
Internet Source

24 www.ombendahara.com <1%
Internet Source

25 vdocuments.site <1%
Internet Source

26 swamandiri.wordpress.com <1%
Internet Source

27 Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta
Student Paper <1%

28 aimos.ugm.ac.id
Internet Source <1%

29 apbehavioralaccounting.blogspot.com
Internet Source <1%

30 ejournal.unmuha.ac.id
Internet Source <1%

31 ppjp.ulm.ac.id
Internet Source <1%

32 taditaandina.blogspot.com
Internet Source <1%

33 Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Student Paper <1%

34

ml.scribd.com

Internet Source

<1%

35

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

<1%

36

jurnal.umsu.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On